

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame bahwa dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan. Reklame yang menjadi media penyampaian iklan suatu acara atau produk saat ini sudah banyak terpasang di pinggir-pinggir jalan di Kota Yogyakarta. Namun banyak dari reklame tersebut tidak memiliki izin resmi pendirian reklame. Jika suatu titik reklame sudah terbit izin pendirian reklame untuk seseorang seharusnya tidak ada lagi izin terbit baru dititik tersebut. Penempatan reklame yang berjarak sangat dekat juga bisa dikarenakan orang yang memasang reklame tersebut tidak tahu bahwa sebenarnya di tempat tersebut sudah ada orang lain yang memiliki hak milik pemasangan reklamnya. Penempatan yang tidak teratur juga bisa dikarenakan banyak orang tidak tahu bahwa ada izin resmi yang mengatur tentang peletakan pemasangan reklame agar tidak sembarangan. Saat ada pengecekan ke lapangan reklame-reklame yang tidak memiliki izin resmi tersebut bisa digusur masal oleh petugas dinas.

Izin merupakan sebuah persetujuan tertulis yang berdasar pada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk pemenuhan hukum administrasi agar sesuai dengan rencana dan ketertiban. Izin sendiri juga berguna untuk mengantisipasi ketidak sesuaian papan-papan reklame dengan prosedur dan peraturan yang sudah diterbitkan pemerintah. Karena faktanya masih banyak papan reklame yang terpasang tidak sesuai izin, tempat dan masa berlaku sehingga berpengaruh juga terhadap keindahan kota (Christitaria, 2015). Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggara reklame atas nama sendiri atau pihak lain yang digunakan untuk keperluan administratif sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Pelayanan yang dilakukan saat ini adalah dengan melayani pemohon secara manual, hal ini mengakibatkan penyebaran informasi-informasi tentang penyelenggaraan reklame sulit didapat. Bahkan pemohon tidak tahu di titik mana saja ada reklame yang sudah

terpasang atau titik reklame yang masih kosong dimana mereka bisa membangun reklame. Tidak adanya sumber informasi yang bisa diakses dari mana saja untuk mengetahui syarat apa saja yang harus dibawa saat akan mendaftar permohonan penyelenggaraan reklame, hal ini mengakibatkan ketidak efisienan waktu yang dihabiskan untuk mengurus izin. Karena pemohon bisa jadi kurang syarat tertentu dan harus kembali lain waktu untuk memenuhi persyaratan.

Untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien Dinas Penanaman Modal dan Perizinan memerlukan sebuah sistem berbasis lokasi untuk mempermudah permohonan penyelenggaraan reklame. Selain untuk keperluan administratif pengurusan permohonan akan lebih mudah dengan adanya sebuah sistem yang ikut menangani penerbitan Surat Ketereangan Kesesuaian Titik Reklame (SKKTR) agar pemasangan reklame kedepannya lebih mempertimbangkan lingkungan yang akan menjadi titik pemasangan reklame misalnya berkaitan dengan keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kepentingan pembangunan daerah. Selain itu sistem juga untuk mempermudah penyebaran informasi kepada calon pemohon. Dengan adanya sistem baru yang dibuat diharapkan dapat membantu pemohon mengetahui titik reklame sudah pernah terbit izinnnya, jika sudah diketahui demikian maka tidak ada izin kedua yang terbit atas nama orang lain untuk sebuah titik reklame. Informasi penting lainnya untuk calon pemohon adalah bahwa pemasangan reklame di Kota Yogyakarta dapat dilakukan pada tanah milik perorangan bagian depan atau samping, tanah milik pemerintah dan fasilitas umum seperti tiang penerangan jalan, halte, gapura, tugu dan lain-lain dan harus sesuai dengan desain ciri khas Kota Yogyakarta. Untuk penentuan lokasi pemasangan reklame sendiri tidak mengacu pada dasar tertentu untuk memilih tempat yang tepat untuk memasang iklan pada sebuah papan reklame, karena pada umumnya pemohon sudah menentukan tempat dimana iklan tersebut akan dipasang (Christitaria, 2015).

Sistem berbasis lokasi dibuat dengan menerapkan GIS (*Geographic Information System*). GIS yang diterapkan dalam sebuah organisasi terdiri dari sekumpulan metodologi, teknologi (software dan hardware) dan sumber daya (manusia) yang digunakan untuk mengolah data geografis secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pada sistem ini dipetakan titik reklame yang sudah memiliki izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) atau biasa disebut titik Perwal. Kelebihan saat GIS diterapkan dalam sistem ini adalah user dapat melihat dan memahami pola penempatan titik reklame dalam bentuk peta yang mudah dipahami dengan adanya legenda yang membantu menjelaskan simbol-simbol yang muncul di peta.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diharapkan pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan akan lebih efektif dan efisien karena menerapkan teknologi GIS pada aplikasi sehingga pemohon merasa puas dengan informasi yang didapat dan permohonan izin reklame dapat di urus dengan mudah karena sudah ada sistem yang menangani penerbitan SKKTR. Selain itu dampak lain yang juga diharapkan hasilnya akan terlihat pada keindahan dan kerapian Kota Yogyakarta yang mana tidak banyak tersebar reklame-reklame yang saling berdempetan dan terlihat tidak rapi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka didapat rumusan masalah yaitu mengenai tata letak reklame saat ini yang kurang memperhatikan keterbatasan ruang untuk pemasangan reklame dan mengganggu keindahan kota. Untuk mengatasi masalah tersebut diberlakukan peraturan mengenai pengurusan izin pemasangan reklame yang salah satu syarat untuk mengurus izin pembangunan reklame adalah SKKTR, untuk memudahkan pemohon mengurus syarat-syarat secara online maka dibuatlah SKKTR.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka batasan masalahnya adalah:

1. Sistem ini ditujukan untuk melayani permohonan SKKTR di Kota Yogyakarta.
2. GIS (*Geographic Information System*) dalam sistem ini diimplementasikan dengan memanfaatkan Google Maps.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendukung peraturan pembangunan reklame yang lebih memperhatikan keindahan dan kerapian kota. Dengan adanya SKKTR maka pembangunan reklame menjadi lebih teratur karena penempatannya sudah tepat di titik-titik yang sesuai.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Peneliti melakukan studi pustaka untuk mencari sumber pustaka yang berkaitan dengan aplikasi yang dibuat. Sumber pustaka yang dicari adalah yang berkaitan dengan aplikasi reklame yang menggunakan GIS. Dengan metode penelitian ini didapatkan hasil dari sumber pustaka yang sudah tertulis sebelumnya.

2. Pembangunan Perangkat Lunak

a. Analisis Kebutuhan

Tahapan analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan aplikasi berdasarkan fungsionalitas dan non-fungsionalitas. Dari analisis tersebut didapatkan spesifikasi dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk aplikasi pelayanan tersebut.

b. Merancang Aplikasi

Tahap ini dilakukan untuk membuat rancangan berdasarkan spesifikasi yang sudah didapatkan. Hasil dari perancangan ini adalah arsitektur aplikasi, data-data yang dibutuhkan untuk administrasi layanan dan tampilan dari aplikasi pelayanan itu sendiri. Rancangan aplikasi ini meliputi syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus SKKTR, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dan diunggah di form pendaftaran, dan informasi lokasi titik-titik reklame yang ditampilkan melalui web.

c. Implementasi SKKTR Berbasis GIS (*Geographic Information System*)

Pada tahap ini dilakukan pengembangan rancangan dari hasil tahap-tahap sebelumnya. Dan menghasilkan aplikasi yang dapat berjalan sesuai arsitektur yang ada. Saat GIS diimplementasikan maka titik-titik lokasi reklame divisualkan dalam peta, dalam hal ini GIS diimplementasikan dengan memanfaatkan Google Maps.

d. Pengujian Aplikasi

Pengujian aplikasi terdiri dari pengujian fungsionalitas dan pengujian pengguna. Pada pengujian fungsionalitas dilakukan pengecekan fungsionalitas dari aplikasi yang sudah dibuat. Sedangkan pengujian pengguna akan menguji sistem yang sudah jadi dan mengecek apakah fungsi pada sistem sudah sesuai untuk menangani pengurusan SKKTR sesuai dengan prosedur yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan laporan dari Pembangunan Sistem Permohonan Surat Keterangan Kesesuaian Titik Reklame, batasan dan metodologi yang digunakan, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian singkat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan topik dalam Tugas Akhir ini.

BAB III: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian dasar teori yang digunakan untuk merancang dan membuat program sehingga bisa menjadi pembanding dan acuan pada pembahasan masalah.

BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi penjelasan analisis kebutuhan perangkat lunak dan juga membahas rancangan perangkat lunak yang dibangun.

BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini berisi implementasi dan gambaran umum perangkat lunak.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini.